

**KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**NUR RAHMA DIYANI
NPM : 1521020151**

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

**KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NUR RAHMA DIYANI
NPM : 1521020151

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II :Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai kedudukan dan peran dalam pemerintahan. Kedudukan Lembaga legislatif adalah kedudukan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Rumusan masalah di dalam ini adalah bagaimana kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia dan bagaimana kedudukan dan peran legislatif di Indonesia ditinjau dari syasah dusturiyah.

Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, serta diinterpretasikan, untuk menganalisis data dilakukan secara *kuantitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami dan kemudian disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan apabila ditinjau dari siyasah dusturiyah. Peran lembaga legislatif sama dengan lembaga syura dalam Islam, yaitu keduanya merupakan lembaga musyawarah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Kedudukan lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan dalam perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mereka juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran dalam memilih pemimpin tertinggi negara, tetapi juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah dari tindakan pelanggaran. Dalam kajian siyasah syar'iyah, lembaga legislatif merupakan lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahma Diyani
NPM : 1521020151
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Syasah Dusturiyah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2019

Penulis,

Nur Rahma Diyani
NPM. 1521020151



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di
Indonesia Ditinjau dari Syasah Dusturiyah**

Nama : Nur Rahma Diyani

Npm : 1521020151

Jurusan : Syasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A
NIP. 195812071987034003

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Mengetahui
Ketua Jurusan Syasah

Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Syasah Dusturiyah."**
Disusun oleh **Nur Rahma Diyani NPM 1521020151**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 November 2019

TEM DEWAN PENGUJI

Ketua

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Penguji Pendamping I

Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji Pendamping II

Frenki, M.Si. (.....)

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Drs. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadam. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(An-Nisa: 58)¹



¹Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 68

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

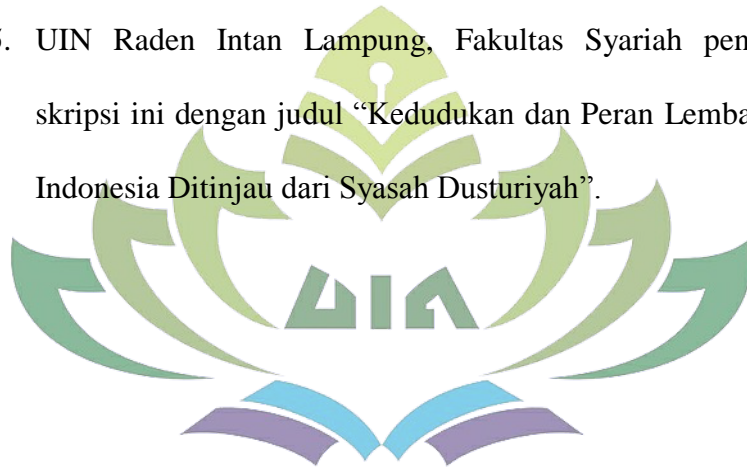
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yakni, Ayahanda Manidi Hasan, BBA (Alm) dan Ibunda Elvia Rosdiana yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidikku, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta memotivasiku selama ini.
2. Saudara Kandungku: Kelima kakaku tersayang yakni, Yeni, Novi, Veronika, Yusuf, Dewi dan Keempat adik laki-lakiku yang aku sayangi yakni, Hamid, Daud, Idris Dan Adik Bungsuku Sulaiman mereka yang selalu menjadi penyemangat dan menantikan keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat ku menimbang ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Nur Rahma Diyani, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 11 Februari 1996, anak keenam dari pasangan Bapak Manidi Hasan, BBA (Alm) dan Ibu Elvia Rosdiana. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK Taruna Jaya Bandar Lampung, Pada Tahun 2000-2001.
2. SD Negeri 1 Karang Anyar Lampung Selatan, Pada Tahun 2002-2008.
3. SMP Negeri 10 Bandar Lampung, Pada Tahun 2008-2011.
4. SMA Negeri 6 Bandar Lampung, Pada Tahun 2011-2014.
5. UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Syasah Dusturiyah”.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Segala Puji syukur bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari Syasah Dusturiyah”**. Shalawat teriring salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umat Islam mendapatkan syafa'atnya kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag.,
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lmpung Dr. H. Khairuddin, M.H., yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyyah Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. yang telah memfasilitasi kepentingan mahasiswa.

4. Pembimbing I Drs. Henry Iwansyah, M.A., yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, arahan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II dan sekaligus sekretaris jurusan Siyasa Syar'iyah Frenki, M.Si., yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, arahan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung seluruh pihak akademis yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.
8. Segenap guruku dimasa TK, SD, SMP, dan SMA yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kasih sayang.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi riski, desi, kartika, Nisa, Ipeh, Rahmatang, Mazan, Tri, Sobri, Mba Nur, Mega, Rahma terimakasih atas bantuan dan arahannya selama ini.
10. Sahabat terbaikku Ressa, Eva, Aprita, Elda, Ana, Desta, Rosma, Hani, Irma, Eka, terimakasih selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangatiku agar cepat selesai mengerjakan skripsi.

11. Teman seperjuangan Siyasah yang telah memberikan pengalaman dan banyak kenangan selama ini.

12. Para sahabat dan teman seperjuangan KKN yang memberikan semangat dan dukungan serta mengajarkan arti kekompakkan dan kebersamaan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.



Bandar Lampung, 13 September 2019

Nur Rahma Diyani
NPM. 1521020151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan enelitian	7
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	12
B. Majelis syura.....	16
1. Pengertian Majelis Syura.....	16
2. Sejarah Majelis Syura	26
3. Peran dan Fungsi Majelis Syura	30
4. Wewenang Majelis Syura	32
5. Tata Cara dalam Melakukan Syura	37
6. Pembagian Kekuasaan dalam majelis syura	42

C. Tinjauan Pustaka.....	44
--------------------------	----

BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

A. Pengertian Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia	50
B. Sejarah Perkembangan Lembaga Legislatif di Indonesia.....	42
C. Tugas dan Wewenang Legislatif di Indonesia.....	65

BAB IV ANALISIS

A. Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia	84
B. Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiah.....	87

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR PUSTAKA



`BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah kalimat yang terdapat pada judul skripsi **“Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**.

Kedudukan berarti status yang diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.¹

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²

Lembaga legislatif, adalah badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres,

¹Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), hlm.10

²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 212

dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif.³

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).⁴

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang status dan fungsi lembaga pembuat Undang-Undang di Indonesia dilihat dari konsep yang ada dalam *fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Kedudukan lembaga legislatif adalah kedudukan yang terpenting dalam pemerintahan, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan

³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 8

⁴Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), h. 142

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 177

lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Perumusan Konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya.

2. Secara Subjektif

1. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, selain itu penulis penulisan ini didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
2. Data dan literatur yang mendukung pembahas skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum Kedudukan dan peran lembaga legislatif adalah sesuatu yang menjadi bagian pemegang kepemimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini dapat berarti bahwa peran menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁶

Kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia adalah suatu lembaga atau badan yang dibentuk berdasarkan hak pilih rakyat dan memiliki hak inisiatif membuat Undang-Undang. Biasanya kedudukan itu dijalankan oleh suatu badan legislatif suatu badan perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilihan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peran yang berbeda. Seperti, kedudukan MPR setelah dilakukan perubahan UUD 1945 tidak lagi menempati sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti (Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, dan MK). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Sebelum Perubahan) dan Penjelasan UUD 1945 bahwa, kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. Peran MPR adalah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷

Kedudukan dan peran lembaga legislatif dalam *siyasah dusturiyah* adalah kedudukan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif oleh lembaga yudikatif

⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2012), h..

⁷Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), h.

atau peradilan. Oleh karena itu Orang-orang yang berperan dan duduk di lembaga legislaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa ayat :58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadam. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa: 58).*⁸

Pada ayat diatas jelas sekali, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, maksud “berhak” disini adalah kecakapan, jadi amanah itu harus diberikan kepada orang yang cakap untuk memegang amanah ini. Karena dalam Islam pun diajarkan kepada umat manusia untuk berlaku adil atau seimbang dalam memperlakukan sesamanya, membagi sama banyak,

⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 68

serta memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama.

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-Quran dan sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah Undang-Undang *Ilahiyah* yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas (analogi)*.

Kesimpulan masalah dari lembaga legislatif di Indonesia dengan *siyasah dusturiyah* adalah merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan. Posisi lembaga legislatif yang sejajar dengan lembaga eksekutif menjadikan adanya keseimbangan dalam pemerintahan apabila ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Peran lembaga legislatif sama dengan lembaga syura dalam Islam, hal mana keduanya merupakan lembaga musyawarah untuk membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Kedudukan lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan lembaga dalam perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mereka juga mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan tetapi juga mencakup

melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah dari tindakan pelanggaran. Dalam kajian *siyasah syar'iyah*, lembaga legislatif merupakan lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Sebab dengan penamaan *ahl al-hall wa al-'aqd* tersebut, tentu menjamin tidak ada perselisihan. Namun beberapa ulama telah memberikan perhatian terhadap *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terkadang pula mereka disebut sebagai *ahlul-ikhtiyar* (ahli memilih pemimpin), *ahlusy-syura* (juru musyawarah/ runding), atau *ahlul-ijtihad* (pakar ijtihad).

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara bagi akademisi dalam mempelajari Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara, yang membahas kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data

dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, jurnal, catatan, dan dokumen.⁹

Untuk mengetahui dalam hal ini secara khusus yang berhubungan langsung pada kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus di tela'ah buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, dan buku tentang Kedudukan dan Peran lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 57

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode *dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.¹²

4. Metode pengolahan data

Data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

b. *Sistematizing* atau sistematisasi

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klafikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kuantitatif* fyaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h. 9

¹² *Ibid*, h. 220.

tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kuantitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta atau peristiwa yang konkrit yang khusus ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.¹³



¹³Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung:PT Remaja Roska Karya,2000), h. 3

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁴

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan

¹⁴Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012), h. 19.

stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁵

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. *Pertama* dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁶

Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan Hadis adalah faktor penentuan keselamatan umat manusia

¹⁵ *Ibid.*, h. 20

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 47-48.

di dunia sampai di akhirat. Seperti peraturan yang pernah di praktekkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi penting dari prinsip “Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis. Mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur’an dan teladan Nabi dalam sunnahnya.

Pada masalah Khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca Khulafa’ar rasidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan Konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon atas gagasan politik Barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab, salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan

negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau *ahl al-hall wa al-'aqd* atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta al-Mawardi menyebutnya sebagai *Ahlal-Ikhtiyar*.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah Undang-Undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana. Menurut teori Trias Politika bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara (eksekutif), kekuasaan pembuat Undang-Undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Dari pengertian *Siyasah Dusturiyyah* di atas, ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyyah* sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyyah* hanya di batasi dalam membahas pengaturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah* antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan *waliyul ahdi*,

persoalan perwakilan dan *ahlul halliwal aqdi*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.¹⁷

2. Pengertian Majelis Syura

Secara etimologi kata “*syura*” berasal dari kata *sya-wa-ra* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁸ Kata *musyawarah*, berasal dari bahasa arab. Kata ini terambil dari akar kata *ش*, *و*, dan *ر* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu.¹⁹

Syura berarti mengeluarkan nasehat kepada yang dinasehati diminta atau tidak diminta. Kata *syura*, sebagaimana yang disebutkan dalam otoritas bahasa, berasal dari kata *syara* yang berarti mengambil. Dalam kamus-kamus bahasa arab dijelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab: artinya “aku mengambil madu dari tempatnya”, juga ungkapan artinya “aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya”. Jadi dengan demikian *syura* artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya.²⁰

Kata *syura* dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 214

¹⁹ Ali Nurdin, *Qur'anic Society*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 226

²⁰ Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura*, Terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: PT. Lkis 2003), h.26

yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan suara. Dari sisi ini, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah *syura al-a'sal* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.²¹

Konsep *syura* acapkali disalah pahami oleh literatur Barat. Arti *syura* dipahami sebagai “konsultasi”. *Syura* merupakan proses legislatif dimana badan eksekutif harus menerima keputusan badan legislatif. Ini adalah ketentuan Ilahi, sebab Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak membuat keputusan kecuali melalui *syura*. Al-Qur'an menggambarkan kaum muslim sebagai mereka yang mengambil keputusan melalui proses *syura*.

Oleh sebab itu, *syura* merupakan proses integral dalam berfungsinya negara Islam, karena ia satu-satunya cara kolektif yang benar yang dengannya umat atau para wakilnya bisa membuat dan mengesahkan Undang-Undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, *syura* merupakan tulang punggung sistem politik Islam. *Syura* didefinisikan sebagai proses yang melaluinya keputusan mengenai urusan publik negara dibuat. Keputusan seperti itu mengikut pada badan eksekutif, karena *syura* adalah ketentuan Ilahi.²²

²¹ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2003), h. 139-140

²² Bernard Lewis, *Et.Al. Islam Liberalisme Demokrasi, Terj. Mun'im A. Sirry*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2002), h. 183-184.

Merujuk pengertian yang telah ada, maka *syura* dapat diartikan dengan kata musyawarah adalah meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman pada suatu perkara untuk mencapai pendapat yang lebih mendekati kebenaran. *Syura* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Ketentuan Qur'ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.

Syuro' memiliki makna musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Dalam pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah) *Syuro'* merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pada masa pemerintahan *Khulafa Ur Rasyidin*, *Syuro'* merupakan landasan ideal dalam menentukan seorang pemimpin (Khalifah), demikian juga dalam proses pembagian kekuasaan serta proses-proses pemerintahan lainnya.

Dalam at-Tafsir al-Munir dijelaskan yang artinya “Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para

shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.”²³

Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: “Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasulullah SAW”. (HR. alTirmidzi).

Rasulullah SAW menegaskan bahwa makna penting musyawarah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*ma tasyawura qawmun illa huduww li arsyada amrihim*).²⁴

Mengenai permasalahan pokok syura, apakah syura sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.²⁵

Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat

²³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Damaskus,: PT. Dar al-Fikr 2009), h. 469

²⁴ *Ibid*, hlm.469

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2012), h. 379-380

mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi SAW., dan *Khulafa ar-Rasyidin* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi. *Masyru'iyah* musyawarah ditetapkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan sirah *al-Khulafa ar-Rasyidin*. Islam menganjurkan untuk bermusyawarah pada berbagai persoalan dan menjadikan sebagai upaya yang harus ditempuh untuk mencari kebenaran, baik dalam persoalan-persoalan penting seperti mengatur persoalan umat, ataupun pribadi.

Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang cerdas di dalam memecahkan masalah yang pelik dan bermusyawarahlah dengan orang-orang yang teguh pendirian di dalam memecahkan kemusyikilan. Hendaknya itu dilakukan supaya ia terhindar dari kesalahan dan selamat dari kekeliruan sehingga ia semakin dekat dengan kemenangan.

Adapun dalil-dalil musyawarah, diantaranya (Q.S. Ali-Imran :159)

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ حَوْلُكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sewkiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran :159).

Terjadi silang pendapat di kalangan musafir mengenai perintah Allah SWT kepada Nabi SAW supaya beliau bermusyawarah, padahal Allah SWT telah membekali beliau dengan taufik dan pertolongan. Secara garis besar perbedaan tersebut dapat dibagi ke dalam empat penafsiran: ²⁶

1. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat di dalam urusan peperangan supaya beliau memperoleh ide yang para sahabat di dalam urusan perang kemudian beliau merealisasikan ide tersebut. Pendapat ini di kemukakan oleh Hasan. Rasulullah SAW bersabda, “tidaklah sesuatu kaum bermusyawarah, kecuali mereka diberi petunjuk kepada sesuatu yang paling baik bagi urusan mereka”.

²⁶ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj. Khalifaturrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: PT. Qisthi Press, 2017), h. 84

2. Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat demi menyatukan mereka dan mendekati hati mereka. Penafsiran seperti ini dipegang oleh Qatadah.
3. Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat karena di dalam musyawarah terdapat banyak kebaikan dan mendatangkan banyak manfaat. Penafsiran ini dinyatakan oleh Adh-Dhahhak.
4. Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat supaya diikuti oleh kaum Muslimin dan kaum Mukminin meskipun beliau sendiri sebenarnya tidak butuh bermusyawarah dengan mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan.²⁷

Melalui ayat ini, Allah menjelaskan sifat-sifat utama yang mencirikan dan Allah memuji mereka karena sifat-sifat ini. Di antara sifat-sifat tersebut ialah mengamalkan perintah-perintah dari Allah untuk mengerjakan shalat, bermusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari penjelasan ayat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah, dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ayat tersebut adalah termasuk dalam kelompok ayat *makkiyah*. Ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Arab juga sudah

²⁷ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,h. 85.

mengenal tradisi musyawarah, sehingga wajar kalau al-Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya adalah fitrah manusia.²⁸

Pandangan yang hampir sama diberikan oleh Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntutan al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa lembaga ini (musyawarah) kemudian diperluas oleh al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.²⁹

Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung di atas berimplikasi kepada perlunya membentuk institusi yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam pelebagaan terhadap musyawarah. Hal ini terlihat dalam sejarah baik pada masa Nabi SAW maupun pada masa *al-Khulafa' ar-Rosyidin*. Pada masa Rasulullah SAW meskipun tidak disebut secara resmi namun keberadaan para sahabat mendampingi Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya, sebagai mitra dialognya dapat dijadikan tanda tentang pelebagaan musyawarah dalam bermasyarakat.³⁰

Secara garis besar, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam al-Qur'an.

²⁸ Ali Nurdin, ... h. 230

²⁹ *Ibid.*, h.250

³⁰ Abdullah ad-Dumaji, *Imamah, Uzhma*, Ter. Umar Mujaahid, (Jakarta: PT. Ummur Qura, 2016), h.482-483.

Agar prinsip *syura* ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu ruang lingkup *syura*, ahli *syura*, tata cara dan etika *syura*.

Lembaga musyawarah (*ijma'* atau *ahlu al-hal wa al-aqdi*) adalah merupakan lembaga untuk meneliti, membahas memutuskan dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan ummat dan persoalan masyarakat. Oleh karena, maka yang menjadi ahli *syura* ialah para ulama, para pemimpin, para ahli dari berbagai bidang yang memahami dan menghayati prinsip-prinsip dan hikmah ajaran Islam yang termasuk persyaratan bagi setiap pemimpin ummat Islam, sehingga *syura* tidak keluar dari *nash-nash* syari'at Islam dan spiritnya. Nabi sendiri dalam melakukan musyawarah lebih banyak mengikut sertakan sahabat-sahabat senior atau sahabat tertentu saja yang memang mempunyai pandangan dan pemikiran yang tajam. Oleh karena itu, para ulama' memandang bahwa musyawarah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam dan ketajaman pikiran.³¹

Mereka yang diisyaratkan al-Qur'an dengan ungkapan *ulu al-amr*, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

³¹ Abdullah ad-Dumaji, Imamah, h. 284

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S :An-Nisa :59)

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan *ulu al-amr* dalam ayat tersebut. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok; pertama, *ulu al-amr* adalah para penguasa atau pemerintah. Antara lain disampaikan oleh Abdullah Yusuf Ali ketika menafsirkan ayat tersebut. Kedua, yang dimaksud dengan “*ulu al-amr*” adalah para ulama, antara lain didukung oleh Ibnu Katsir. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.³² Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli syura antara lain:

1. Syarat-syarat ideal, yaitu mendalami dan menghayati ajaran-ajaran Islam dan (bagi para ulama) ilmu-ilmu yang diperlukan untuk beristinbath.
2. Syarat-syarat mental, antara lain: ikhlas, adil, bijaksana, mempunyai ketajaman pikiran dan bertaqwa.
3. Syarat-syarat keahlian, yaitu memiliki cukup ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang keahlian.

Sedangkan menurut al-Mawardi yang dikutip oleh Muhammad Tholhah Hasan dalam bukunya “*Islam dalam perspektif sosio kultural*” Syarat-syarat anggota ahli syura, antara lain:

³²Ali Nurdin,... h. 235

1. Mempunyai sifat adil (adalah) dengan segala persyaratannya.
2. Mempunyai pengetahuan (ilmu), utamanya yang berkaitan dengan pemerintahan.
3. Mempunyai wawasan dan kebijakan (*ra'yu wal hikmah*) agar dapat memilih kepala negara yang tepat dan berkemampuan.³³

2. Sejarah Majelis Syuro

Realitas problematika yang dihadapi umat Islam pasca meninggalnya Rasulullah SAW adalah pertanyaan tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam pada waktu itu. Hal ini terjadi karena sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis tidak secara tegas dan detail yang memberikan penjelasan pola suksesi kepemimpinan. Karena itu, pola suksesi pengangkatan kepemimpinan, bentuk dan sistem pemerintahan negara merupakan wilayah *ijtihad* yang diberikan kepada umat manusia untuk menata kehidupannya berdasarkan realitas tantangan kehidupan yang dihadapinya.³⁴

Disisi lain, dalam perkembangan sejarah, keragaman aliran politik telah melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda antara umat Islam. Perbedaan ini semakin mengental ketika Islam menghadapi kolonialisme Barat pada abad ke-19 M. Kolonial Barat yang telah menginvasi berbagai daerah-daerah Islam, juga melakukan hegemoni ideologis terhadap suatu wilayah negara-bangsa. Berbagai macam ragam respon umat Islam terhadap konsep negara modern yang

³³Muhammad Thohir Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: PT.Lantabora Press, 2004), h. 309.

³⁴Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 120

dipropagandakan oleh orang Barat. Ada yang menerima dan mengadopsinya secara total, ada yang menolak secara fundamental, dan ada yang mengapresiasi secara kritis dan realitas dengan menyaring untuk menyesuaikan dengan norma-norma keIslaman.³⁵

Berbeda dengan sikap pertama, sikap kedua ini lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-quran ibarat ensiklopedi telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal ini dijabarkan pula oleh Nabi dalam membangun Negara Madinah dan pemerintahan yang dilanjutkan oleh penerus beliau *Khulafa al-Rasyidun*. Inilah yang mesti diteladani oleh umat Islam.

Kemudian terdapat juga pemikiran dengan pola yang lain, yaitu Islam memang tidak menyediakan konsep legislatif yang baku untuk diterapkan oleh umat Islam. Namun, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi.³⁶

Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, dari berbagai

³⁵Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Bandung: Cet. I, Mizan, 1990), h. 236.

³⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, Cet. IV, 1993), h. 11

kesamaan dan perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara seksama mempunyai sumber yang satu yakni dari Islam itu sendiri. Dalam terminologi ketatanegaraan (*siyasah syar'iyah*), masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem politik untuk mewujudkan tujuan-tujuan filsafatnya tidak menutup mata bagi semua yang datang dari luar dan asing. Begitu pula tidak selalu menerima apa yang datang dari luar tanpa memahami dan melakukan penyaringan dengan berijtihad. Politik Islam terkait dengan waktu dan ruang tentang keberadaannya. Hal ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan, dan konsep politik Islam harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah.

Tiga sikap ini lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan ini. Sikap pertama lahir dari pemikiran bahwa Al-Quran tidak memiliki konsep legislatif yang baku dan Muhammad SAW dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kedudukan politik. Tugas Muhammad SAW hanyalah sebagai penyampai wahyu tanpa pretensi untuk mendirikan negara. Karena itu, umat Islam harus meniru Barat untuk mencapai kemajuan mereka.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kedudukan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri' iyah*, yaitu kedudukan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang diberlakukan bagi umat

Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* ditunjukkan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kedudukan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kedudukan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kedudukan yudikatif (*al-sulthah al-sulthahal-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kedudukan legislatif (*al-sulthah al-tasiri'iyah*) berarti kedudukan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
2. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan masyarakat Islam.
4. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
5. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.³⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas

³⁷Kun Budianto, *Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitui, Legislasi Demokrasi, Ummah dan Syuro*, JSSP, Vol.1No. 2, Desember 2017

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸

3. Peran dan Fungsi Majelis Syura

Dalam tatanan masyarakat muslim modern, adalah sebuah keniscayaan ketika menjalankan sebagian hukum ajaran agama (*syari'ah*) mengalami persinggungan dengan hukum positif negara. Demikian pula dengan prinsip musyawarah (*syura*) dalam implementasinya pada tatanan negara hukum modern yang mengalami fleksibilitasnya. Perubahan pengalaman umat manusia, khususnya umat Islam, dalam skala universal disertai pula dengan menguatnya tuntutan terhadap partisipasi rakyat dan mengentalkan identitas komunal. Kedua fenomena tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan ini menunjukkan upaya individu dan kelompok untuk melakukan kontrol atas kekuasaan pemerintahan, yaitu:

1. Melaksanakan perintah Allah dan mencontoh perbuatan Rasulullah tentang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan umat Islam.
2. Melahirkan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang ditetapkan karena keputusan tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta. PT. Kencana, 2004), h. 177.

3. Melahirkan keputusan dan ketetapan yang baik dan bijaksana karena keputusan tersebut ditetapkan oleh banyak pihak.
4. Menghindari perselisihan antara golongan yang dapat mengakibatkan kehancuran dan kerugian negara.
5. Memilih pimpinan yang terbaik dan disetujui semua pihak karena itu kualitasnya akan lebih dapat dipertanggung jawabkan.
6. Mengurangi bahkan menghilangkan keluhan kesah yang mengakibatkan penyelewengan sebagai akibat dari keputusan yang tidak atau kurang representatif.
7. Memberikan pendidikan politik yang baik, praktis dan murah.
8. Menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama umat manusia, khususnya umat Islam.
9. Menciptakan persatuan dan kesatuan karena hasil musyawarah biasanya merupakan jalan tengah yang memiliki daya tarik semua pihak. Jadi hasilnya dapat mengikat semua pihak.
10. Mewujudkan keadilan karena putusan hasil musyawarah telah disetujui oleh semua pihak maka hasilnya bersifat adil untuk semua pihak.
11. Menciptakan kerukunan dan ketahanan umat sehingga dapat menangkal berbagai rongrongan dan ancaman terhadap negara dan pemerintah.³⁹

³⁹Jhon L Esposito dan Jhon O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 13

4. Wewenang Majelis Syura


Majelis syura sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat memiliki hak dan kewajiban diantaranya yaitu sebagai berikut:.

a. Hak majelis *Syura* dalam arti hak yang diterima oleh anggota majelis syura antara lain sebagai berikut :

1. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis *syura*, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain :

a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis syura.

 b. Mendapat pengamanan dari negara, karena ia adalah sebagai orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.

c. Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis *syura*.⁴⁰

Sebagaimana yang di bahas di atas bahwa syura dalam arti bahasa Indonesia berarti “musyawarah”, defenisi secara umumnya yakni mengeluarkan pendapat dalam suatu forum atau perkumpulan yang dihasilkan dari pola pemikiran masing-masing individu yang tergabung dalam forum tersebut. Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan

⁴⁰Muhammad Imran, *Jurna IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2015

Undang-Undang, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemasalahatan individual dan kemasalahatan umum.

Rakyat harus memberikan pendapatnya kepada penguasa dengan pendapat yang mereka anggap baik dalam perkara-perkara di atas, baik penguasa tersebut meminta pendapat mereka ataupun tidak. Maksud dari kewajiban musyawarah ini adalah membatasi sejauh mana keterikatan penguasa dengan musyawarah dan apa yang harus dilakukan bila keterikatan itu adalah keterikatan yang pasti yang masuk dalam ruang lingkup “wajib”, atau tidak pasti yang masuk dalam ruang lingkup “sunnah”.⁴¹

b. Kewajiban Majelis Syura berikut ini disajikan beberapa kewajiban majelis syura sebagai lembaga tertinggi negara yaitu :

1. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah
2. Mengawasi jalannya pemerintahan
3. Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah.
4. Menetapkan garis-garis program negara yang akan dilaksanakan oleh khalifah.
5. Menetapkan anggaran belanja negara.
6. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan negara.

⁴¹Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam As-Syurah*, Oleh FaturahmanA Hamid, (Jakarta: PT. AMZA, 2005) , h. 58

7. Menghadiri sidang majlis *syura* setiap saat persidangan.⁴²

Selanjutnya, jika didasarkan pada proses suksesi selama pemilihan *khulafa al-rasyidun* dan tahapan-tahapan konsensus yang mengiringinya, maka *syura* dalam perspektif sahabat nabi SAW dalam memilih kepala negara dapat dirumuskan dalam beberapa point, yaitu:

1. Dalam suatu negara, pemilihan kepala negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum dan tak seorang pun yang berhak untuk mengangkat dan dengan paksaan atau kekerasan sebagai amir mereka.
2. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas kaum muslimin dan tanpa adanya pemaksaan atau ancaman.
3. Pemilihan harus dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai pelaksana jalannya pemilihan.⁴³

Hukum Islam, khususnya fiqh pada prinsipnya memiliki watak dinamis yang meletakkan titik berat perhatiannya kepada persoalan duniawi yang bergumul dengan kehidupan kebangsaan dewasa ini dan memecahkan persoalan hidup, maka dengan demikian hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*), dan tidak hanya terikat pada gambaran dunia hayal yang menurut teori telah tercipta dimasa lampau. Sehingga, pemikiran

⁴²Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj. Khalifaturrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: PT. Qisthi Press, 2017), h. 21

⁴³Jhon L Esposito dan Jhon,....h. 73

Islam harus memiliki pendekatan multidimensional dalam segala aspek kehidupan.⁴⁴

Mayoritas ahli hukum Islam meletakkan *syura* atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip Konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* Alquran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Kedudukan Konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer (negara hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan otoritarian adalah dua hal berlawanan yang tak mungkin bertemu.

Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktator justru merupakan wujud pemberhalaan kekuasaan dan politik buta.

Abu Bakar al-Asam (w. 816 M), berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka harus ada *syura* (musyawarah), dan dalam proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan.

Dalam praktek nabi Muhammad SAW hanya memusyawarahkan urusan dunia. Para sahabat kadang bertanya apakah keputusan atau

⁴⁴Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", *Jurnal Prima*, Vol. III, No. 4, (Agustus 1975), h. 56

pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu atautkah inisiatif beliau. Bila bukan atas wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Menurut Abd al- Qadir Audat yang dikutip dalam buku Suyuthi Pulungan, ada dua hal yang tidak terjadi dalam musyawarah yaitu;

Pertama, memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Kedua, keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam AlQur'an dan Sunnah. Sejalan dengan hal pertama, Rasyid Ridho menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan dunia saja, bukan urusan agama.

Dalam sisi teknis, menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diamalkan sesuai perkembangan *syura* adalah:

- 1) Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beroposisi;
- 2) Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep kekebalan hukum;
- 3) Prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan kewenangan masing-masing;
- 4) Menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip.

Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan, harta benda.⁴⁵

5. Tata Cara dalam Melakukan Syura

Tentang bagaimana cara melakukan musyawarah, al-Qur'an maupun Nabi SAW tidak menentukan secara rinci. Hal ini juga mengukuhkan pandangan diatas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga al-Qur'an hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.⁴⁶

Dan ada pun Sistem Pengangkatan Khalifah Dalam *Syura* Dalam sejarah Islam telah sama kita ketahui bahwa yang pertama menjadi pemimpin umat Islam ialah nabi Allah Muhammad SAW, dan selama berpuluh-puluh tahun beliau mengemban tugas sebagai pemimpin umat sekaligus Kepala Negara tersbut sampai wafatnya. Beliau wafat tanpa sama sekali meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun

⁴⁵Muhammad Siddiq Armia, "Mengimplementasikan Konstitusionalisme Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, (2018), h. 437

⁴⁶ Muhammad Iqbal, h. 219

menentukan calon-calon pengganti beliau. Karena tidak adanya syarat-syarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah Alqur'an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para Sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah saw, seleksi dan penunjukkan Kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah Alqur'an tersebut.

Dengan demikian, khalifah pertama dipilih secara terbuka ialah Abu Bakar, dan ketika sampai pada saat terakhir masa jabatannya, beliau tidak menunjuk siapa pengganti beliau, walaupun beliau tahu bahwa khalifah Umar bin Khattab yang paling tepat untuk menggantikannya, tetapi beliau percaya dengan cara bermusyawarah bersama para sahabat, beliau dapat menyampaikan pendapatnya untuk memilih khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah beliau. Setelah lama Umar bin Khattab menjabat Umar pun dalam keadaan sakit parah.

Kemudian beliau membentuk Dewan Permusyawaratan atau dalam bahasa Al-Mawardi adalah *Ahlul Ikhtiyar*, yang beranggotakan keenam orang sahabat tersebut serta mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih khalifah berikutnya dari kalangan mereka sendiri, dengan mengamanatkan bahwa barang siapa mencoba menjadi Amir tanpa disetujui oleh massa muslim harus dipenggal. Pada akhirnya Lembaga Permusyawaratan tersebut, setelah dilakukan survei yang sangat mendalam dan teliti oleh Abdurahman bin Auf, beliau sampai pada

kesimpulan bahwa massa muslim memiliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang, yaitu Ali dan Utsman; dan dari keduanya, pandangan sedikit lebih berat ke Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah.

Setelah kematian Utsman yang tragis disebabkan oleh pembunuhan. Beberapa orang sahabat mengadakan sidang di rumah Ali, dan menyatakan kepada Ali bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai Amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. Dan merupakan kenyataan pasti bahwa mayoritas rakyat menyetujui Ali sebagai khalifah mereka. Dalam mengangkat khalifah atau Kepala Negara bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk menunjuk kepala negara, dan *ahl imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara.

Dan untuk mewujudkannya adalah perkara yang dapat didiskusikan dan dikembangkan sesuai dengan berbagai situasi umat dan kondisi kehidupannya.

Adapun bagaimana etika bermusyawarah dilakukan barangkali dapat dijadikan rujukan. Tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah, yaitu; ⁴⁷

⁴⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 5

1. Berlaku lemah lembut, Sikap ini penting, terutama bagi seorang pemimpin. Islam memerintahkan untuk senantiasa menjaga sopan santun dalam berdebat dan mengutarakan pendapat, serta menghargai pendapat pihak lain dengan tanpa tergesa-gesa memvonis salah. Islam melarang sebuah perdebatan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sikap yang kasar dan mau menang sendiri bisa membuat bisa membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati dan melakukan aksi *walk out*. Akibatnya, musyawarah tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan.
2. Memberi maaf, dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ini mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal pikiran kita harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab, jika emosional yang muncul, musyawarah pun bisa berubah menjadi ajang pertengkaran, sehingga tidak menghasilkan apa-apa selain permusuhan dan dendam.
3. Tawakkal, musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah SWT, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Barulah setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah, semua hasil tersebut diserahkan kepada Allah (tawakkal). Manusia hanya bisa merencanakan, sesuai dengan kemampuan dan keputusan

mereka. Karena itu, dalam pelaksanaannya, Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya.

Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berserah diri kepada-Nya. Fakhruddin ar-Razi penulis tafsir al-kabir, yang dikutip oleh Waryono Abdul Ghofur dalam bukunya tafsir sosial, menangkap beberapa positif dari sikap Nabi dan perintah musyawarah tersebut, yaitu:⁴⁸

1. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa rakyat atau orang lain itu rendah dan bodoh dan pemimpin itu paling tahu.
2. Meskipun Nabi adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia ia memiliki kemampuan yang terbatas. Karena itu ia sendiri menganjurkan melalui sabdanya “bahwa tidak ada satu kaum yang bermusyawarah yang tidak ditunjuki kearah penyelesaian terbaik perkara mereka dan Aisyah menyaksikan bahwa tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah SAW”.
3. Menghilangkan buruk sangka, dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
4. Mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi daripada kesalahan keputusan individu. Hal-hal positif

⁴⁸ *Ibid*, h. 218-219.

muncul karena musyawarah menghasilkan masyurah: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.⁴⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah dipraktekkan sejak lama. Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan karena, syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hanya saja, Al-Qur'an mengubah syura dari sebuah institusi suku yang dilandaskan pada hubungan darah menjadi institusi komunitas yang merupakan prinsip hubungan iman. Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak akan tapi untuk kepentingan atau kemasalahatan umum atau rakyat.

6. Pembagian Kekuasaan dalam Majelis Syura

Berkaitan dengan teori trias politica ini, hukum Islam pun mengatur tentang hal tersebut. Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Dalam *siyasah dusturiyah*, kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majelis Syura” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi*” atau seperti yang

⁴⁹Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: PT. Elsaq Press, 2005), h. 156- 157

disebut Abu A'la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat”serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiyar*.⁵⁰

Pemikiran politik Islam merupakan hasil kajian filosofis ke dalam bentuk dan peranan pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama dan dunia, dan dalam hubungan-nya dengan perubahan sosial didunia Islam. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”QS. Al-Nisa’:58-59)

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 64.

⁵¹ Ahmad Sukarjo, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, h. 197.

1. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah) lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah) lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.
3. Lembaga yudikatif (sultah Qada'iyyah) lembaga ini adalah lembaga negarayang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa *khulafaur rasyidin*. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis *Syura*, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif diperinci lewat Undang-Undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab membuat Undang-Undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.

B. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul "*kedudukan dan peran lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah*" Adapun beberapa karya lain yang pernah ditulis oleh penulis lain yaitu sebagai berikut:

Resti Rifa Fauziah, dalam skripsi yang ditulis dengan judul *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Badan Legislasi Nasional”*, menyatakan bahwa Badan Legislasi Nasional merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan sebagai pusat pembentukan Undang-Undang atau hukum nasional di Indonesia. Akan tetapi pasca revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 maka ada salah satu kewenangan substansial dalam Badan Legislasi yang hilang, yaitu kewenangan untuk mengajukan usul inisiatif perubahan atau Rancangan Undang-Undang. Ketersediaan konsep siyasah dusturiyah dalam bidang legislasi dan dilatari oleh kedudukan dan kewenangan yang sama-sama merupakan bagian dari kajian siyasah dusturiyah yang menyebutkan bahwa unsur badan legislasi terdiri dari eksekutif dan legislatif, sehingga tidak ada pemisahan kewenangan dalam hal pembentukan hukum meskipun di dalamnya eksekutif ikut membahas tetapi perbedaannya badan eksekutif tidak masuk kedalam unsur legislatif.

Penelitian ini mengarah pada Badan Legislasi DPR dibentuk melalui proses politik dalam bentuk pemilihan berdasarkan sistem paket yang terdiri dari satu ketua dan 3 wakil sedangkan mekanisme pemilihan anggota majelis syura' baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dikemukakan perinciannya oleh nash-nash syariat maka diserahkan sepenuhnya kepada umat untuk menentukan sistemnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemilihan anggota majelis syura terjadi secara

langsung bersamaan dengan pemilihan Imam (Eksekutif) dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan sebagai pusat pembentukan hukum nasional/Undang-Undang di Indonesia. Dalam kajian siyasah dusturiyah keanggotaan badan legislasi terdiri dari legislatif dan eksekutif sebagai anggota permanen badan yang berbeda secara operasional dengan sistem Balegnas yang hanya menempatkan unsur legislatif dalam keanggotaan permanennya tidak dengan eksekutif (Presiden). Sehingga, kewenangan legislasi tidak dimonopoli oleh unsur legislatif tetapi juga unsur eksekutif. Kedudukan Balegnas dalam siyasah dusturiyah setara dengan Khalifah berbeda dengan Balegnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang hanya sebagai alat kelengkapan dewan. Selama peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh Balegnas tidak bertentangan dengan peraturan baik secara vertikal maupun horizontal maka dibolehkan melakukan ijtihad dan menjunjung tinggi prinsip musawarah, persamaan, dan maslahat dalam setiap proses perumusan peraturan perUndang-Undangan.⁵²

Firdaus ayu palestina, dalam skripsi yang ditulis dengan judul “*Analisis penataan kewenangan antar Penyelenggara Pemilihan Umum ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd al Dzari’ah*” penelitian ini mengkaji tentang penataan kewenangan antar Penyelenggara Pemilu sesuai dengan proposional normatif. Adapun yang menjadi fokus

⁵² Resti Rifa Fauziah, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Badan Legislasi Nasional*, (skripsi program studi siyasah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017), h. 32

permasalahan dalam penelitian ini adalah penataan kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Bagaimana penataan kewenangan tersebut jika ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd Al-Dzari'ah. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut : KPU sebagai Pelaksana Pemilu, Bawaslu sebagai Pengawas pelaksana Pemilu, dan DKPP sebagai badan yang memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, mengimbangi serta mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu. Hal ini oleh penulis, berdasarkan telaah data didasari oleh beberapa faktor, yaitu : 1) Pemahaman kewenangan masing-masing yang masih kurang, 2) Adanya intervensi dan tekanan dari pihak lain, 3) Adanya sikap ingin lebih unggul, 4) Kurang tegasnya DKPP dalam menangani setiap kasus. Kedua, Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Konsep Wewenang Arkoun) dan Sadd Al-Dzari'ah diketahui bahwa Penyelenggara Pemilu (sebagai seorang “dusturi”, yang memiliki otoritas dalam artian pejabat publik) telah melakukan wewenang, yakni “siyasah” dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan patuh dan melaksanakan Undang-Undang, meskipun dalam praktiknya masih terjadi over lapping (tumpang tindih). Sedangkan dalam konsep Saad Al-Dzari'ah, Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU berusaha untuk menutup

kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik guna terciptanya regulasi yang revolusioner, sedangkan Bawaslu bertindak sebaliknya (Fath Al-Dzari'ah) dengan mempertimbangkan persamaan hak, namun mengesampingkan langkah kedepannya.⁵³

Bagus setiawan, dalam skripsi yang ditulis dengan judul *“Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”*, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam sistem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menghasilkan temuan bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Seharusnya kedudukan dan kompetensi DPD RI itu harus diperkuat atau ditambah lagi melalui amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga DPD RI menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam kinerjanya membangun daerah. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem tatanegara Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai, karena ahl al-halli wa al-aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa, sedangkan DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang

⁵³ Fauzi Ayu Palestina, *Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Sadd Al Dzari'ah*, (Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, 2019), h.2.

terbatas. Sejatinya eksistensi DPD RI ditingkatkan dan diperkuat kembali Undang-Undangnya melalui amandemen kelima terhadap UUD 1945.⁵⁴

Meskipun dari beberapa tinjauan pustaka di atas ada kemiripan, tapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesi Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*.



⁵⁴ Bagus Setiawan *Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi Program Studi Siyasah Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung, Cet. I, 1990
- Ad-Dumaji Abdullah, Imamah, *Uzhma, Ter. Umar Mujtahid*, Jakarta: Ummur Qura, 2016.
- Al-Jabiri Muhammad Abed, *Syura Terj Mujiburrahman*, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Al-Zuhayli Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Jilid 2*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Anwar Khairil, et al, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo*, 2015.
- Ari Dwipayana, *Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta: USAID, 2008
- Asshiddiqie Jimly, 200, *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*”, disampaikan dalam, *Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten*” yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten.
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- , *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Deskripsi singkat mengenai penelitian kualitatif dapat dilihat dalam Anselm Straose and Juliet Corbien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur Teknik dan Teori Grounded*, (terjemahan Junaidi Ghoni), Bina Ilmu , Surabaya, 1997
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Eddy, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2002
- El- Fadl, *Islam Dan Tantangan Demokrasi*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

- Ghafur Waryono Abdul, *Tafsir Sosial*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Hasan Muhammad Thohir, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jhon L Esposito dan Jhon O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009
- Karim Khalil Abdul, *Syari'ah sejarah perkelahian dan pemaknaan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Lewis Bernard, et.al, *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta Selatan: Paramadina, 2002.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1995).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Al Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj. Khalifaturrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2, 2017.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, Cet. IV, 1993
- Nurdin Ali, *Qur'anic Society*, PT. Gelora Aksara Pratama.Perubahan IV UUD 1945, 2006.
- PAF Lamintang dan FT Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Randlon Naning, Lembaga Legislatif sebagai pilar Demokrasi dan mekanisme Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.

Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PUKAP, 2008

Simorangkir J.C.T. dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar UUD 1945*. Jakarta: Jambatan, 1982.

Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suny Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997

Fauziah Resti Rifa, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Badan Legislasi Nasional*, skripsi program studi siyasah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Palestina Fauzi Ayu, *Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh-Siyasah Dusturiyah Dan Sadd Al Dzari'ah*, Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, 2019.

Bagus Setiawan *Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Program Studi Siyasah Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wasistiono Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*, Bandung : Fokusmedia, 2009

Jurnal-Jurnal

Firman Manan, "Relasi eksekutif Legislatif Dalam Presidensialme Multipartai Di Indonesia ", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2017).

Hananto Widodo, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat, " *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2012).

Sofyan Hadi, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, (Februari 2013)

Saifuddin, “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017)

Muhammad Imran, “Sistem Syuro Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam ”, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 7, (April 2015)

M. Nur Sholikin, “Perbaikan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan PeradilanPSHK*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2014)

Muhammad Siddiq Armia, “Mengimplementasikan Konstitusionalisme Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, (2018)

Mujib Rohmat, “Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, (Mei-Agustus 2016).

Undang-Undang

Undang-undang No 22 Tahun 1999

Undang-undang No 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Internet

[www.cetro.or.idhttp://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)

